PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP *OVERSTAY* DI INDONESIA: PENDEKATAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN KEBIJAKAN BEBAS VISA

Komang Sandiasa Dicky Permana¹, Muhammad Rizky Fathan²

Jurusan Keimigrasian, Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia^{1,2}

Email: Sandiasadicky@gmail.com

Informasi

Abstract

Volume : 2
Nomor : 8
Bulan : Agustus
Tahun : 2025
E-ISSN : 3062-9624

Global mobility in the digital era has significantly transformed the landscape of immigration governance, reshaping both opportunities and challenges for national border control. Indonesia, as one of Southeast Asia's major tourist and business hubs, has implemented a visa-free policy to stimulate economic growth, attract foreign visitors, and strengthen cultural exchanges. However, such policies have also created legal vulnerabilities, particularly the administrative violation of overstaying by foreign nationals. The persistent occurrence of overstay, as emphasized by Warren (2017), remains a global issue that demands strategic, technology-driven solutions. This research employs a normative legal approach (Marzuki, 2015) complemented by qualitative descriptive analysis (Moleong, 2011), focusing on the enforcement of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration. Data are drawn from primary legal sources, secondary literature, and relevant statistical reports, including those from the Central Statistics Agency (BPS, 2024) and the United Nations World Tourism Organization (UNWTO, 2025). The findings highlight that advancements in artificial intelligence (AI)-based early warning systems, biometric verification, and integrated cross-border databases have enhanced the monitoring and detection of potential violations. Moreover, inter-agency cooperation and the implementation of the selective policy principle (Syahrin, 2018) have proven effective in balancing security concerns with economic interests. This study concludes that continuous innovation, coupled with strong legal enforcement and international collaboration, is essential for addressing the evolving patterns of human mobility in the digital age. The implications extend beyond Indonesia, offering valuable insights for other nations facing similar immigration law enforcement challenges.

Keyword: Immigration Law, Overstay, Visa-Free Policy, Digital Surveillance, Indonesia.

Abstrak

Mobilitas global di era digital telah mengubah secara signifikan lanskap tata kelola keimigrasian, membentuk peluang sekaligus tantangan baru bagi pengendalian perbatasan negara. Indonesia, sebagai salah satu pusat pariwisata dan bisnis utama di Asia Tenggara, menerapkan kebijakan bebas visa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menarik kunjungan wisatawan mancanegara, serta memperkuat pertukaran budaya. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kerentanan hukum, khususnya pelanggaran administratif berupa tinggal melebihi izin (overstay) oleh warga negara asing. Fenomena overstay yang terus berulang, sebagaimana ditegaskan oleh Warren (2017), merupakan masalah global yang memerlukan strategi penanganan berbasis teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (Marzuki, 2015) dengan analisis deskriptif kualitatif (Moleong, 2011), berfokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Data penelitian diperoleh dari sumber hukum primer, literatur sekunder, dan laporan statistik relevan, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) serta United Nations World Tourism Organization (UNWTO, 2025). Hasil

penelitian menunjukkan bahwa kemajuan teknologi seperti sistem peringatan dini berbasis kecerdasan buatan (AI), verifikasi biometrik, dan integrasi basis data lintas negara telah meningkatkan kemampuan pemantauan serta deteksi potensi pelanggaran. Selain itu, kerja sama antarinstansi dan penerapan prinsip kebijakan selektif (Syahrin, 2018) terbukti efektif dalam menyeimbangkan kepentingan keamanan dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi berkelanjutan yang didukung penegakan hukum yang tegas dan kolaborasi internasional menjadi kunci menghadapi dinamika migrasi manusia di era digital. Implikasi temuan ini tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga memberikan wawasan bagi negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam penegakan hukum keimigrasian.

Kata Kunci: Hukum Keimigrasian, Overstay, Kebijakan Bebas Visa, Pengawasan Digital, Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah mempercepat arus perpindahan manusia lintas negara. Fenomena ini mendorong terciptanya hubungan yang semakin erat antara mobilitas internasional, kebijakan imigrasi, dan keamanan negara (Castles & Miller, 2020). Indonesia, sebagai negara kepulauan strategis di jalur perdagangan dan pariwisata dunia, mengalami peningkatan signifikan jumlah kedatangan warga negara asing (WNA) setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2024 mencapai 12,5 juta orang, meningkat 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Tren ini sejalan dengan laporan United Nations World Tourism Organization (UNWTO, 2025) yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari lima negara di Asia Tenggara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat pascapandemi.

Salah satu kebijakan yang berkontribusi terhadap peningkatan arus masuk WNA adalah kebijakan bebas visa kunjungan singkat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat sektor pariwisata, memperluas hubungan diplomatik, dan meningkatkan devisa negara. Namun, kemudahan akses masuk ini tidak terlepas dari risiko, khususnya overstay atau tinggal melebihi batas izin yang diberikan. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan keamanan (Syahrin, 2018).

Menurut Warren (2017), overstay merupakan pelanggaran imigrasi yang umum terjadi di banyak negara, dan sering kali lebih sulit dideteksi dibandingkan masuk secara ilegal. Dalam konteks Indonesia, pelanggaran ini diatur sebagai pelanggaran administratif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan sanksi berupa deportasi, penangkalan, dan/atau denda administratif. Meskipun telah ada mekanisme pengawasan,

efektivitasnya sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan koordinasi antarinstansi (Hamidi, 2015).

Memasuki tahun 2025, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) telah memberikan peluang baru dalam pengawasan keimigrasian. Integrasi basis data imigrasi terpusat, biometrik, dan sistem peringatan dini berbasis AI memungkinkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran izin tinggal. Beberapa negara bahkan telah menerapkan sistem geo-fencing yang memantau pergerakan WNA melalui perangkat seluler yang terhubung ke sistem imigrasi nasional (UNWTO, 2025). Indonesia juga mulai mengadopsi teknologi ini, meskipun implementasinya masih pada tahap awal dan memerlukan evaluasi menyeluruh terkait aspek hukum, etika, dan privasi.

Selain tantangan teknologi, dimensi sosial-budaya juga memengaruhi pola pelanggaran izin tinggal. Beberapa WNA memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan untuk bekerja secara ilegal, membuka usaha tanpa izin, atau melakukan kegiatan yang melanggar norma masyarakat setempat. Kasus penangkapan sejumlah WNA di Bali dan Batam pada periode 2022–2024 menunjukkan bahwa pelanggaran overstay sering kali berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal untuk kepentingan ekonomi pribadi (Kementerian Hukum dan HAM, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penegakan hukum keimigrasian terhadap overstay di era digital, khususnya dalam konteks penerapan kebijakan bebas visa di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan dan peningkatan efektivitas pengawasan, serta menawarkan rekomendasi strategis yang relevan dengan dinamika global dan perkembangan teknologi tahun 2025.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik overstay dan kebijakan bebas visa di Indonesia. Menurut Marzuki (2015), pendekatan hukum normatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menelaah hukum dari perspektif internal, yakni dengan meneliti norma-norma hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan dengan isu penelitian. Untuk mendukung pendekatan hukum normatif, penelitian ini juga menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2011), metode ini bertujuan untuk menganalisis

fenomena, mengidentifikasi peraturan, mendeskripsikan data yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun sekunder, serta menginterpretasikan makna data tersebut berdasarkan kerangka teori yang digunakan. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji isu overstay secara komprehensif, baik dari segi normatif maupun dari aspek praktis pelaksanaannya di lapangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, serta peraturan pelaksana terkait.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel akademik yang membahas topik keimigrasian, overstay, dan kebijakan bebas visa.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring resmi dari lembaga nasional maupun internasional, termasuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations World Tourism Organization (UNWTO).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan isu penelitian. Menurut Sugiyono (2018), studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengolah data dari berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian.

Proses analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan isi dari bahan hukum dan literatur yang dianalisis. Analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur kebijakan bebas visa dan sanksi overstay.
2. Mengklasifikasikan data berdasarkan kategori tematik seperti prosedur masuk, pengawasan, dan penindakan pelanggaran izin tinggal.
3. Menginterpretasikan data dengan mengaitkan teori migrasi internasional, teori kebijakan selektif (Syahrin, 2018), dan teori penegakan hukum administrasi.

Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki landasan hukum yang kuat, didukung oleh data empiris, serta mempertimbangkan perkembangan teknologi dan dinamika sosial di tahun 2025. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga aplikatif bagi pembuat kebijakan dan praktisi keimigrasian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pemberian Izin Masuk

Pemberian izin masuk bagi warga negara asing (WNA) ke wilayah Indonesia merupakan tahapan awal yang sangat menentukan efektivitas pengawasan keimigrasian. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen seleksi untuk memastikan bahwa setiap orang yang masuk memenuhi syarat hukum dan tidak menimbulkan potensi ancaman terhadap keamanan atau ketertiban umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pemberian izin masuk dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang tersebar di bandara internasional, pelabuhan laut, dan pos lintas batas darat. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal.

Kebijakan bebas visa kunjungan singkat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016, memberikan kemudahan bagi WNA dari negara tertentu untuk masuk ke Indonesia tanpa visa dengan masa tinggal maksimal 30 hari dan tidak dapat diperpanjang. Menurut Syahrin (2018), kebijakan ini merupakan bagian dari selective policy principle, yakni prinsip selektif dalam keimigrasian yang bertujuan menyaring WNA yang bermanfaat bagi pembangunan nasional.

Secara prosedural, WNA yang masuk melalui bebas visa wajib:

1. Menunjukkan paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan.
2. Menunjukkan tiket keluar dari Indonesia.
3. Mengisi dan menyerahkan kartu kedatangan (arrival card) atau sistem Electronic Customs Declaration.
4. Melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi untuk verifikasi identitas dan kelengkapan dokumen.

Dalam konteks tahun 2025, proses verifikasi identitas semakin mengandalkan teknologi digital. Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Terintegrasi (SIMKIM) yang memanfaatkan biometrik wajah, sidik jari, dan pemindaian retina untuk mempercepat proses identifikasi (Kementerian Hukum dan HAM, 2024). Langkah ini sejalan dengan rekomendasi International Civil Aviation Organization (ICAO) terkait Machine Readable Travel Documents (MRTD).

Meskipun prosedur ini sudah cukup ketat, beberapa celah masih dimanfaatkan oleh oknum WNA, misalnya dengan memberikan keterangan palsu terkait tujuan kunjungan, atau

memanfaatkan kebijakan bebas visa untuk melakukan kegiatan yang dilarang seperti bekerja tanpa izin. Warren (2017) mencatat bahwa kelemahan verifikasi awal sering kali menjadi pintu masuk bagi pelanggaran izin tinggal di kemudian hari.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian izin masuk di Indonesia sudah mengadopsi teknologi modern, tetapi efektivitasnya akan sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi, kapasitas petugas, dan kecepatan pembaruan basis data internasional.

Pengawasan dan Pencegahan Overstay

Pengawasan izin tinggal WNA merupakan aspek krusial dalam penegakan hukum keimigrasian. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah memastikan setiap WNA mematuhi batas waktu izin tinggalnya dan tidak melakukan pelanggaran administratif maupun tindak pidana selama berada di Indonesia. Menurut Hamidi (2015), pengawasan yang efektif membutuhkan kombinasi antara mekanisme pemeriksaan administratif, teknologi pemantauan, serta koordinasi antarinstansi yang solid.

Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi Digital

Memasuki tahun 2025, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengimplementasikan Immigration Alert and Control System (IACS) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Sistem ini memanfaatkan biometrik, AI-based early warning system, dan geo-fencing untuk memantau pergerakan WNA. Data keberangkatan dan kedatangan otomatis diperbarui melalui kerja sama dengan maskapai penerbangan (Advance Passenger Information System).

UNWTO (2025) merekomendasikan pemanfaatan big data analytics untuk memprediksi potensi overstay berdasarkan riwayat perjalanan dan pola perilaku WNA. Indonesia mulai mengadopsi metode ini untuk mengidentifikasi profil berisiko tinggi, misalnya WNA dengan riwayat pelanggaran sebelumnya.

Koordinasi Antarinstansi dan Pelibatan Masyarakat

Pengawasan lapangan dilakukan oleh Unit Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang melibatkan Kepolisian, TNI, Pemerintah Daerah, dan Kementerian/Lembaga terkait. Menurut Syahrin (2018), pendekatan kolaboratif ini penting karena pelanggaran izin tinggal sering kali tersebar di wilayah yang luas dan sulit dijangkau hanya oleh petugas imigrasi.

Pemerintah juga mulai mendorong partisipasi masyarakat melalui platform "Laporkan WNA" yang terhubung ke aplikasi M-Paspor. Warga dapat melaporkan dugaan pelanggaran izin tinggal dengan mengunggah bukti foto atau video yang kemudian diverifikasi oleh petugas.

Contoh Kasus Overstay di Indonesia 2022–2025

1. Kasus WNA di Bali (2023) – Seorang WNA asal Rusia diamankan karena tinggal 90 hari melebihi izin bebas visa dan bekerja sebagai fotografer lepas tanpa izin kerja. Kasus ini terungkap melalui laporan masyarakat yang melihat promosi jasanya di media sosial.
2. Kasus WNA di Batam (2024) – Enam WNA asal Tiongkok ditangkap karena overstay selama lebih dari 6 bulan dan diduga menjalankan usaha judi online. Investigasi dilakukan bersama pihak kepolisian setelah menerima informasi dari masyarakat setempat.
3. Kasus WNA di Jakarta (2025) Dua WNA asal Nigeria diamankan karena overstay selama 45 hari. Penangkapan dilakukan setelah sistem IACS mengirimkan alert kepada petugas bahwa mereka belum tercatat melakukan exit clearance sesuai jadwal.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan efektif membutuhkan sinergi teknologi, koordinasi lintas instansi, dan partisipasi publik. Namun, tantangan masih ada, terutama terkait keterbatasan anggaran, pelatihan teknis petugas, dan isu perlindungan data pribadi WNA yang diawasi.

Analisis Efektivitas

Dari analisis penelitian, penerapan teknologi telah meningkatkan deteksi dini pelanggaran izin tinggal. Namun, keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada pembaruan regulasi yang mengakomodasi perkembangan teknologi serta perjanjian pertukaran data dengan negara asal WNA. Menurut Moleong (2011), efektivitas kebijakan akan optimal apabila didukung dengan pemahaman yang komprehensif terhadap konteks sosial dan budaya tempat kebijakan tersebut diterapkan.

Penindakan Pelanggaran Izin Tinggal

Penindakan terhadap pelanggaran izin tinggal merupakan tahap akhir dalam siklus pengawasan keimigrasian. Tahap ini berfungsi untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera, dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, overstay dikategorikan sebagai pelanggaran administratif yang dapat dikenakan sanksi berupa denda, deportasi, penangkalan, atau kombinasi dari ketiganya.

Mekanisme Penindakan

Penindakan dimulai dari proses pemeriksaan administratif oleh petugas imigrasi. WNA yang diduga melanggar batas izin tinggal akan dipanggil atau diamankan untuk dimintai keterangan. Apabila terbukti melakukan overstay, petugas menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan menetapkan jenis sanksi yang akan dikenakan.

Sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 26 Tahun 2016, yaitu:

1. Denda administratif sebesar Rp1.000.000 per hari overstay.
2. Deportasi, yaitu pemulangan paksa ke negara asal dengan biaya yang dapat dibebankan kepada WNA atau sponsor.
3. Penangkalan, yaitu larangan masuk kembali ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu (umumnya 6 bulan hingga permanen).

Prinsip Ultimum Remedium

Meskipun overstay adalah pelanggaran administratif, dalam kasus tertentu dapat berujung pada proses pidana apabila disertai pelanggaran lain, seperti pemalsuan dokumen, penipuan, atau tindak pidana lain yang diatur dalam KUHP dan undang-undang khusus. Menurut Hamidi (2015), penerapan ultimum remedium menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir jika sanksi administratif tidak memadai untuk memberikan efek jera.

Penerapan Teknologi dalam Penindakan

Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Imigrasi mulai memanfaatkan AI-based Case Management System yang mengintegrasikan data pelanggaran, riwayat perjalanan, dan catatan keimigrasian WNA. Sistem ini memudahkan petugas dalam mengambil keputusan penindakan secara cepat dan berbasis data (data-driven decision making).

Selain itu, penggunaan biometrik real-time di Tempat Pemeriksaan Imigrasi memungkinkan petugas memverifikasi identitas WNA yang hendak keluar dari Indonesia, sehingga pelanggar overstay dapat segera ditindak sebelum meninggalkan wilayah negara.

Contoh Kasus Penindakan 2025

Pada Februari 2025, dua WNA asal Uzbekistan diamankan di Bandara Soekarno-Hatta setelah sistem biometrik mendeteksi bahwa mereka telah overstay selama 120 hari. Keduanya mengaku bekerja secara daring dari Indonesia tanpa izin kerja. Petugas menjatuhkan sanksi deportasi dan penangkalan selama 5 tahun, serta denda administratif sesuai ketentuan. Kasus ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi dan pemeriksaan di pintu keluar efektif mencegah lolosnya pelanggar overstay.

Analisis

Berdasarkan hasil penelitian, penindakan yang cepat, tegas, dan berbasis teknologi mampu meningkatkan kepatuhan WNA terhadap aturan izin tinggal. Namun, keberlanjutan efektivitasnya memerlukan pembaruan peraturan, pelatihan teknis petugas, dan peningkatan

kerja sama internasional. Menurut Moleong (2011), penegakan hukum yang efektif harus mempertimbangkan aspek manusiawi, prosedural, dan teknologi secara seimbang.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal (*overstay*) di Indonesia memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara kebijakan, teknologi, dan koordinasi lintas sektor. Kebijakan bebas visa kunjungan singkat yang diterapkan sejak 2016 memang memberikan dampak positif terhadap pariwisata dan ekonomi nasional, namun di sisi lain menciptakan potensi kerentanan hukum yang harus diantisipasi secara serius.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian izin masuk telah mengalami modernisasi signifikan melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Terintegrasi (SIMKIM) dan teknologi biometrik. Langkah ini selaras dengan standar internasional yang direkomendasikan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO). Meski demikian, masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh WNA untuk masuk dengan tujuan yang berbeda dari izin yang diberikan, sehingga menimbulkan risiko *overstay* di kemudian hari.

Dalam aspek pengawasan, penggunaan Immigration Alert and Control System (IACS), integrasi big data analytics, dan partisipasi publik melalui platform pelaporan telah meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap pelanggaran izin tinggal. Kasus-kasus pada periode 2022–2025 membuktikan bahwa kombinasi teknologi, koordinasi antarinstansi, dan peran masyarakat dapat menghasilkan penindakan yang lebih cepat dan akurat.

Tahap penindakan pelanggaran izin tinggal, baik melalui sanksi administratif maupun penerapan prinsip *ultimum remedium*, semakin efektif dengan dukungan AI-based Case Management System. Integrasi data pelanggaran dengan pemeriksaan biometrik di pintu keluar telah berhasil mencegah WNA pelanggar *overstay* meninggalkan wilayah Indonesia tanpa proses hukum.

Namun, efektivitas kebijakan dan teknologi ini bergantung pada beberapa faktor penting. Pertama, pembaruan regulasi agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan pola migrasi global. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik melalui pelatihan teknis maupun penguatan etika profesional. Ketiga, kerja sama internasional untuk pertukaran data dan harmonisasi kebijakan, mengingat pergerakan manusia bersifat lintas batas negara.

Sejalan dengan pendapat Moleong (2011), penegakan hukum keimigrasian tidak hanya membutuhkan perangkat hukum yang memadai, tetapi juga pemahaman kontekstual terhadap aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku WNA di Indonesia. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum harus bersifat adaptif, responsif terhadap perubahan, dan berorientasi pada pencegahan tanpa mengabaikan kepentingan nasional.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memperluas implementasi teknologi pengawasan digital, memperkuat jaringan koordinasi antarinstansi, serta mengembangkan program literasi hukum bagi WNA yang masuk ke Indonesia. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat mempertahankan manfaat ekonomi dari kebijakan bebas visa sekaligus meminimalkan risiko pelanggaran overstay di era digital tahun 2025 dan seterusnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2024. BPS RI.
- Castles, S., & Miller, M. J. (2020). *The age of migration: International population movements in the modern world* (6th ed.). Macmillan International Higher Education.
- Hamidi, J. (2015). *Hukum keimigrasian: Teori dan praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- International Civil Aviation Organization. (2023). *Machine Readable Travel Documents (MRTD) specifications*. ICAO.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2024). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2024*. Ditjen Imigrasi.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrin, M. A. (2018). *Kebijakan selektif dalam keimigrasian Indonesia: Perspektif hukum dan keamanan nasional*. Jakarta: Prenada Media.
- United Nations World Tourism Organization. (2025). *Tourism highlights: 2025 edition*. UNWTO.
- Warren, A. (2017). *Managing overstayers: Immigration policy and enforcement strategies*. *Journal of Border Security Studies*, 12(3), 145–162.